

Peran Pemerintah Kampung Dalam Mendorong Pembentukan Koperasi Merah Putih di Kampung Turiram Distrik Kimam Kabupaten Merauke

**Edmundus Cuku¹, Aenal Fuad Adam², Antonius Nggewaka³,
Syahrabudin Husein Enala⁴**

^{1,3,4}Ilmu Administrasi Negara Universitas Musamus

²Ilmu Politik Universitas Musamus

edmunduscuku@gmail.com¹, adam@unmus.ac.id², camb@unmus.ac.id³

syahrabudinhuseinenala@unmus.ac.id⁴

Received: 08-11-2025

Accepted: 09-15-2025

Published: 15-09-2025

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah kampung dalam mendorong pembentukan Koperasi Merah Putih di Kampung Turiram, Distrik Kimam, Kabupaten Merauke. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan metode studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap sembilan informan kunci yang terdiri atas kepala kampung, ketua koperasi, ketua Bamuskam, dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah kampung memiliki empat peran utama yaitu sebagai perencana, fasilitator, dinamisator, dan pengawas. Meskipun inisiatif pemerintah kampung cukup tinggi, partisipasi masyarakat masih rendah akibat keterbatasan sumber daya manusia dan akses informasi. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas masyarakat dan dukungan pemerintah daerah dalam penguatan kelembagaan ekonomi kampung. Hasil penelitian ini menegaskan pentingnya pemerintah kampung sebagai agen pemberdayaan masyarakat untuk mencapai kemandirian ekonomi berbasis koperasi lokal.

Kata kunci: koperasi merah putih, pemberdayaan masyarakat, ekonomi lokal

PENDAHULUAN

Pemerintah memiliki peran strategis dalam menggerakkan pembangunan nasional melalui kebijakan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan hasil pembangunan. Dalam teori pembangunan klasik, pemerintah dianggap sebagai motor penggerak utama ekonomi melalui kebijakan fiskal, regulasi, dan pengalokasian sumber daya publik (Todaro & Smith, 2015). Namun, paradigma pembangunan modern memandang pemerintah tidak hanya sebagai regulator, tetapi juga sebagai *enabler* dan *catalyst* bagi tumbuhnya ekonomi berbasis masyarakat (Suryono, 2018). Dalam konteks ini, pemerintah tidak hanya bertanggung jawab atas pertumbuhan ekonomi perkotaan, tetapi juga memastikan pemerataan kesejahteraan hingga ke wilayah pedesaan yang menjadi basis ekonomi

rakyat.

Salah satu bentuk konkret pemberdayaan ekonomi masyarakat desa adalah penguatan kelembagaan ekonomi lokal seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Koperasi Merah Putih. Kelembagaan ini berfungsi sebagai wadah pengelolaan potensi ekonomi masyarakat secara kolektif agar mampu meningkatkan kesejahteraan bersama. Menurut Putnam (1993), keberhasilan pembangunan lokal sangat ditentukan oleh *social capital* berupa kepercayaan, jaringan, dan norma sosial yang menopang kerja sama ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, peran pemerintah tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga sosial dan kultural, untuk menumbuhkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat.

Peran pemerintah kampung menjadi semakin penting sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberikan kewenangan luas bagi desa untuk mengelola potensi dan sumber daya secara mandiri. Pemerintah kampung kini tidak hanya berfungsi sebagai penyelenggara pemerintahan dan pelayanan publik, tetapi juga sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi berbasis masyarakat. Menurut Eko et al. (2014), desentralisasi pembangunan menempatkan pemerintah kampung sebagai subjek pembangunan yang berperan dalam menggerakkan partisipasi masyarakat, sedangkan Chambers (1997) menegaskan bahwa keberlanjutan pembangunan hanya tercapai jika masyarakat dilibatkan secara aktif sejak tahap perencanaan hingga evaluasi. Dengan demikian, pemerintah kampung berperan sebagai fasilitator partisipasi masyarakat dan penghubung antara kebijakan nasional dengan kondisi sosial ekonomi lokal.

Salah satu inisiatif strategis pemerintah untuk memperkuat ekonomi lokal adalah program Koperasi Merah Putih, yang berorientasi pada kemandirian ekonomi dan pemerataan hasil pembangunan. Koperasi ini mengelola sektor-sektor produktif seperti pertanian, perikanan, dan perdagangan rakyat. Berdasarkan artikel *Monitor* (2023) tentang *Urgensi Pengembangan Koperasi Desa Merah Putih dalam Perkebunan Sawit Rakyat*, koperasi ini mampu membangun model ekonomi kolektif yang menghubungkan produsen kecil dengan pasar yang lebih luas. Sementara itu, Simorangkir et al. (2025) menekankan pentingnya regulasi adaptif dan koordinasi antarpemerintah agar koperasi dapat tumbuh sehat dan berdaya saing. Saputri et al. (2025) juga menyatakan bahwa koperasi tidak hanya berfungsi sebagai lembaga ekonomi, tetapi juga sarana memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.

Meskipun potensinya besar, banyak kampung di Indonesia belum memiliki kelembagaan ekonomi yang kuat, termasuk Kampung Turiram, Distrik Kimam, Kabupaten Merauke. Berdasarkan hasil observasi, kampung ini baru memulai pembentukan Koperasi Merah Putih dan belum memiliki BUMKam. Sebagian besar dari 78 kepala keluarga bermata pencaharian sebagai petani ladang, nelayan, dan pengumpul hasil hutan non-kayu dengan pendapatan rata-rata Rp800.000–Rp1.200.000 per bulan. Sebagian besar hasil produksi dijual langsung ke pengepul tanpa pengolahan nilai tambah. Selain itu, belum ada kader

ekonomi lokal yang memiliki kompetensi dalam manajemen usaha atau akuntansi kampung, yang menjadi hambatan dalam pembentukan koperasi.

Keterbatasan sumber daya manusia, akses pendidikan, dan kondisi geografis menjadi faktor penghambat utama dalam pengembangan ekonomi lokal di Turiram. Namun, pemerintah kampung telah menunjukkan langkah progresif melalui pemberian beasiswa pendidikan gratis bagi warga yang ingin melanjutkan pendidikan tinggi, sebagai investasi jangka panjang untuk membangun kapasitas generasi muda. Kebijakan ini sejalan dengan teori *human capital* dari Becker & Gerhart (1996) yang menegaskan bahwa pendidikan merupakan investasi penting dalam meningkatkan produktivitas dan inovasi masyarakat.

Penelitian terdahulu telah membahas koperasi Merah Putih dari aspek hukum, kelembagaan, dan tata kelola (Monitor, 2023; Saputri et al., 2025; Simorangkir et al., 2025). Namun, belum banyak studi yang menyoroti peran pemerintah kampung dalam mendorong pembentukan koperasi tersebut, terutama di wilayah Papua Selatan yang tergolong daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal). Kondisi sosial dan budaya Papua yang khas menuntut pendekatan pembangunan yang sensitif terhadap nilai-nilai lokal dan struktur sosial adat. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki nilai kebaruan (*novelty*) dengan menempatkan pemerintah kampung sebagai aktor strategis dalam membangun kapasitas masyarakat (*capacity building*), pendidikan ekonomi, dan kelembagaan berbasis lokal.

Melalui studi ini, diharapkan diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai tata kelola pemerintahan kampung dalam mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan di daerah terpencil. Selain itu, hasil penelitian diharapkan memberikan kontribusi praktis bagi pemerintah daerah, lembaga pendamping desa, dan pembuat kebijakan nasional dalam memperkuat peran pemerintah kampung sebagai motor penggerak ekonomi masyarakat menuju kemandirian dan kesejahteraan lokal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menggambarkan secara mendalam peran pemerintah kampung dalam mendorong pembentukan Koperasi Merah Putih di Kampung Turiram, Distrik Kimam, Kabupaten Merauke. Pendekatan ini dipilih karena mampu menjelaskan fenomena sosial secara kontekstual berdasarkan pengalaman dan pandangan informan yang terlibat secara langsung dalam proses pendirian koperasi. Fokus penelitian diarahkan pada peran, strategi, hambatan, dan faktor pendukung pemerintah kampung dalam menginisiasi kelembagaan ekonomi lokal.

Penelitian dilaksanakan di Kampung Turiram, Distrik Kimam, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, selama tiga bulan, yaitu dari Juni hingga September 2025. Lokasi ini dipilih secara purposif karena merupakan salah satu kampung yang sedang mengembangkan

kelembagaan ekonomi melalui pembentukan Koperasi Merah Putih, sekaligus mewakili karakteristik wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal) di Papua Selatan.

Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki pemahaman mendalam dan relevansi langsung dengan topik penelitian. Informan terdiri atas sembilan orang, meliputi kepala kampung, ketua Badan Musyawarah Kampung (Bamuskam), ketua koperasi, dua anggota koperasi, dan empat orang masyarakat setempat. Pemilihan jumlah tersebut mempertimbangkan prinsip kecukupan informasi (*information-rich cases*) hingga mencapai titik jenuh data (*data saturation*).

Sumber data penelitian meliputi data primer dan sekunder. Data primer diperoleh langsung melalui wawancara mendalam dan observasi partisipatif terhadap aktivitas pemerintah kampung dan masyarakat yang terlibat dalam pendirian koperasi. Data sekunder berasal dari dokumen resmi seperti laporan kegiatan, peraturan kampung, arsip kebijakan pemerintah daerah, serta literatur terkait pembangunan desa dan kelembagaan ekonomi lokal. Data sekunder digunakan untuk melengkapi dan menguatkan hasil temuan lapangan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga cara utama. Pertama, wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan kepala kampung, perangkat kampung, tokoh masyarakat, dan pengurus koperasi untuk memperoleh pemahaman tentang peran dan strategi pemerintah dalam proses pembentukan koperasi. Kedua, observasi partisipatif, di mana peneliti terlibat secara langsung dalam beberapa kegiatan kampung yang berkaitan dengan pengembangan Koperasi Merah Putih guna memahami interaksi sosial serta dinamika hubungan antara pemerintah kampung dan masyarakat. Ketiga, dokumentasi, yaitu pengumpulan data dari berbagai arsip, laporan, dan dokumen kebijakan yang berkaitan dengan pendirian koperasi di tingkat kampung maupun kabupaten.

Analisis data dilakukan secara kualitatif mengikuti model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi empat tahap, yakni reduksi data, kategorisasi, interpretasi, dan penyajian data. (1) Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi dan menyederhanakan data hasil wawancara, observasi, serta dokumentasi untuk memfokuskan pada aspek-aspek yang relevan dengan tujuan penelitian. (2) Kategorisasi data dilakukan dengan mengelompokkan informasi ke dalam tema-tema analisis yang berkaitan dengan empat fungsi manajemen pemerintahan kampung, yaitu perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan. (3) Interpretasi data bertujuan memberikan makna terhadap hasil pengelompokan data dengan menghubungkannya pada teori dan konteks sosial budaya lokal, sehingga dapat mengungkap pola, hubungan sebab-akibat, dan dinamika sosial yang terjadi. (4) Penyajian data dilakukan dalam bentuk naratif deskriptif yang terstruktur untuk menggambarkan secara komprehensif peran pemerintah kampung dalam pembentukan Koperasi Merah Putih serta

faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Untuk menjaga validitas dan reliabilitas data, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode, yaitu membandingkan hasil wawancara dengan data observasi dan dokumentasi, serta melakukan konfirmasi ulang kepada informan kunci. Pendekatan ini memastikan bahwa hasil analisis merefleksikan realitas empiris di lapangan dan memiliki tingkat keabsahan ilmiah yang tinggi.

Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang utuh tentang peran pemerintah kampung sebagai agen penggerak pembangunan ekonomi berbasis komunitas di wilayah 3T, serta menjadi dasar bagi rekomendasi kebijakan penguatan kelembagaan ekonomi desa di Papua Selatan.

HASIL

Peran Pemerintah Kampung dalam Pembentukan Koperasi Merah Putih di Kampung Turiram

Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana pemerintah kampung berperan dalam mendorong pembentukan Koperasi Merah Putih di Kampung Turiram, Distrik Kimam, Kabupaten Merauke, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi dan tantangan yang dihadapi. Berdasarkan hasil wawancara dengan sembilan informan yang terdiri atas Kepala Kampung, Bamuskam, Ketua dan anggota koperasi, serta masyarakat, ditemukan bahwa proses pembentukan koperasi berjalan melalui empat fungsi utama manajemen publik, yaitu: perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), penggerakan (actuating), dan pengawasan (controlling).

1. Perencanaan (Planning)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses perencanaan pembentukan Koperasi Merah Putih telah dimulai dengan baik melalui musyawarah kampung yang melibatkan aparat pemerintah, Bamuskam, dan masyarakat. Gagasan awal muncul dari kesadaran akan kebutuhan lembaga ekonomi kolektif untuk mengelola hasil pertanian dan perikanan lokal. Kepala Kampung Turiram (TM) menjelaskan bahwa selama ini masyarakat beroperasi secara individual tanpa lembaga yang dapat memperkuat posisi tawar petani dan nelayan.

Namun, hasil wawancara juga menunjukkan bahwa perencanaan masih bersifat konseptual dan belum diformalkan dalam RPJM Kampung atau RKP Kampung. Rencana ini baru dibahas secara informal melalui pertemuan perangkat kampung dan Bamuskam, tanpa dokumentasi strategis yang terukur. Hal ini memperlihatkan bahwa meskipun telah ada partisipasi masyarakat melalui forum musyawarah, proses administratif dan legal masih lemah.

Bamuskam menilai partisipasi masyarakat masih terbatas, terutama dari kelompok perempuan dan pemuda. Menurut KK (Ketua Bamuskam), sebagian warga belum memahami manfaat sosial-ekonomi koperasi. Hal serupa disampaikan oleh LK (Ketua Koperasi), yang menilai bahwa belum ada pemetaan potensi ekonomi lokal secara komprehensif,

termasuk jenis usaha produktif, sumber permodalan, dan strategi pemasaran.

Berdasarkan teori Siagian (2008), perencanaan merupakan proses rasional untuk menentukan tujuan organisasi serta langkah strategis yang diperlukan guna mencapainya. Dalam konteks kampung, perencanaan publik harus bersifat partisipatif, terukur, dan memiliki kerangka waktu yang jelas. Sementara itu, Siabuan (2010) menegaskan bahwa perencanaan efektif mencakup empat unsur penting: (1) tujuan yang jelas, (2) strategi yang rasional, (3) identifikasi sumber daya, dan (4) keterlibatan pihak-pihak terkait.

Jika mengacu pada empat unsur tersebut, maka perencanaan di Kampung Turiram baru memenuhi unsur pertama—penetapan tujuan pembentukan lembaga ekonomi masyarakat. Strategi operasional, pemetaan sumber daya, dan koordinasi lintas lembaga masih perlu diperkuat.

Dari perspektif partisipasi masyarakat, Cohen dan Uphoff (1980) menjelaskan bahwa partisipasi ideal mencakup empat tahap: (1) pengambilan keputusan, (2) pelaksanaan, (3) pemanfaatan hasil, dan (4) evaluasi. Dalam konteks Kampung Turiram, partisipasi baru muncul pada tahap pertama. Ini menunjukkan bahwa pola perencanaan masih cenderung top-down, sementara idealnya menggunakan pendekatan bottom-up agar masyarakat menjadi pelaku aktif.

Chambers (1997) juga menegaskan bahwa pembangunan partisipatif menuntut keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses perencanaan, bukan sekadar kehadiran dalam musyawarah. Partisipasi sejati berarti keterlibatan dalam pengambilan keputusan, penyusunan strategi, dan pengelolaan sumber daya lokal. Dengan demikian, perencanaan koperasi di Kampung Turiram perlu ditingkatkan melalui penyusunan dokumen resmi, pemetaan potensi ekonomi, dan pelibatan semua kelompok sosial agar memiliki legitimasi administratif dan berkelanjutan (Nugroho, 2012).

Secara keseluruhan, tahap perencanaan sudah menunjukkan arah yang partisipatif namun belum sistematis. Diperlukan langkah strategis berupa:

1. Penyusunan dokumen perencanaan resmi (RPJM/RKP Kampung);
2. Pelibatan aktif perempuan dan pemuda;
3. Pemetaan potensi ekonomi lokal;
4. Penetapan indikator keberhasilan koperasi yang terukur.

2. Pengorganisasian (Organizing)

Tahap pengorganisasian ditandai dengan pembentukan tim kecil yang bertugas mempersiapkan dokumen koperasi, melakukan pendataan anggota, dan menyusun AD/ART. Struktur organisasi sementara telah disepakati melalui musyawarah kampung dan mendapat persetujuan Bamuskam. Namun, struktur formal belum disahkan secara administratif oleh Dinas Koperasi Kabupaten Merauke.

Beberapa informan mengungkapkan bahwa pembagian tugas antaranggota tim masih belum tegas dan cenderung tumpang tindih. Masyarakat mengenal pengurus koperasi, tetapi belum memahami

mekanisme kerja organisasi secara menyeluruh. Hal ini menunjukkan bahwa proses pengorganisasian berjalan formalitas administratif, tetapi belum diikuti internalisasi fungsi dan koordinasi yang kuat.

George R. Terry (2006) mendefinisikan pengorganisasian sebagai proses menentukan kegiatan dan sumber daya, lalu mengalokasikannya secara tepat untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam konteks ini, fungsi pengorganisasian di Kampung Turiram sudah terlihat, namun masih lemah dalam aspek koordinasi dan pembagian peran. Siagian (2008) menguraikan tiga prinsip pengorganisasian efektif: (1) struktur dan hierarki jelas, (2) pembagian tugas sesuai kapasitas, dan (3) mekanisme koordinasi yang efisien. Dari hasil lapangan, ketiga prinsip tersebut belum sepenuhnya terwujud.

Menurut Mintzberg (1993), organisasi kecil seperti koperasi desa sebaiknya menggunakan *simple structure*, yang menekankan kepemimpinan kuat, koordinasi langsung, dan komunikasi terbuka. Model ini sebenarnya sesuai dengan kondisi Kampung Turiram, di mana kepala kampung memiliki otoritas moral dan sosial yang tinggi. Namun, untuk beroperasi secara profesional, dibutuhkan penguatan kapasitas SDM dan pelatihan manajemen kelembagaan.

Dengan demikian, pengorganisasian pembentukan Koperasi Merah Putih telah menunjukkan kemajuan dalam pembentukan struktur, tetapi masih perlu:

- Pelatihan manajemen dan penguatan kapasitas pengurus;
- Penetapan job description yang jelas;
- Koordinasi internal yang lebih sistematis;
- Pendampingan teknis dari dinas terkait untuk legalisasi dan tata kelola kelembagaan.

3. Penggerakan (Actuating)

Pemerintah Kampung Turiram telah melaksanakan fungsi penggerakan melalui berbagai inisiatif, antara lain musyawarah, sosialisasi, dan pendampingan administrasi. Kepala kampung bersama Bamuskam memfasilitasi diskusi dengan tokoh masyarakat dan kelompok tani guna menumbuhkan kesadaran kolektif akan pentingnya koperasi. Antusiasme masyarakat terlihat dari partisipasi dalam rapat kampung dan kesediaan menjadi anggota koperasi. Namun, sebagian warga masih pasif karena kurang memahami mekanisme dan manfaat koperasi. Ketua koperasi (LK) menegaskan bahwa keterlibatan masyarakat masih memerlukan arahan teknis dan pelatihan lebih lanjut agar mampu berperan aktif.

Dalam teori manajemen, fungsi penggerakan (*actuating*) menurut Siagian (2008) meliputi kemampuan pemimpin untuk memberikan arahan, memotivasi anggota, dan menggerakkan sumber daya menuju tujuan bersama. Sementara itu, Likert (1967) menekankan pentingnya sistem manajemen partisipatif yang mendorong keterlibatan anggota dalam proses pengambilan keputusan.

Dalam konteks Kampung Turiram, sistem partisipatif ini mulai tampak, tetapi masih terbatas pada tahap awal. Untuk meningkatkan efektivitas, pemerintah kampung perlu melaksanakan:

1. Pelatihan dan pembinaan koperasi secara berkala;
2. Pemberian peran nyata bagi anggota dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan;
3. Komunikasi intensif tentang manfaat koperasi bagi ekonomi keluarga.

Chambers (1997) menambahkan bahwa pemberdayaan masyarakat hanya akan efektif apabila mereka memiliki kendali atas proses pembangunan. Oleh karena itu, penggerakan koperasi di Kampung Turiram perlu diarahkan agar masyarakat merasa memiliki dan bertanggung jawab atas keberhasilan koperasi.

4. Pengawasan (Controlling)

Fungsi pengawasan terhadap pembentukan Koperasi Merah Putih telah dilakukan secara informal melalui pemantauan langsung dan musyawarah Bamuskam. Kepala kampung melakukan supervisi terhadap administrasi dan kegiatan awal koperasi, sementara Bamuskam berfungsi sebagai lembaga pengendali dan pemberi masukan. Namun, sistem evaluasi belum berjalan secara tertulis dan terjadwal. Belum ada laporan periodik maupun indikator kinerja yang digunakan untuk menilai efektivitas kegiatan koperasi. Menurut Siagian (2008), fungsi controlling mencakup pemantauan, evaluasi, dan tindakan korektif agar organisasi tetap pada jalurnya. Dalam hal ini, pemerintah kampung baru melaksanakan pengawasan tahap awal.

Likert (1967) menekankan bahwa pengawasan efektif harus memadukan kontrol formal dan partisipatif, sedangkan Chambers (1997) menyoroti pentingnya pengawasan berbasis komunitas untuk meningkatkan akuntabilitas. Dengan demikian, sistem pengawasan koperasi di Kampung Turiram perlu dikembangkan melalui:

- Pelaporan dan evaluasi berkala;
- Mekanisme tindak lanjut atas hasil evaluasi;
- Keterlibatan masyarakat dalam forum evaluasi koperasi.

Berdasarkan analisis terhadap empat fungsi manajerial tersebut, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kampung Turiram telah berperan aktif sebagai motor penggerak ekonomi masyarakat melalui pembentukan Koperasi Merah Putih. Proses ini menunjukkan dinamika positif menuju kemandirian ekonomi lokal.

Namun, implementasi masih menghadapi beberapa kendala, antara lain:

1. Belum adanya dokumen perencanaan formal;
2. Struktur organisasi belum efektif;
3. Partisipasi masyarakat belum merata; dan
4. Mekanisme pengawasan masih bersifat informal.

Temuan ini memperkuat pandangan bahwa pembangunan ekonomi lokal yang berkelanjutan harus berbasis pada penguatan kapasitas kelembagaan dan partisipasi masyarakat. Pemerintah kampung berperan tidak hanya sebagai fasilitator, tetapi juga sebagai

katalisator yang menjembatani aspirasi masyarakat dengan kebijakan publik.

Koperasi Merah Putih diharapkan menjadi model kelembagaan ekonomi desa yang mampu mengintegrasikan prinsip partisipasi, transparansi, dan pemberdayaan, sebagaimana ditekankan oleh teori pembangunan partisipatif (Chambers, 1997) dan manajemen publik modern (Siagian, 2008).

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah Kampung Turiram memiliki peran strategis dalam mendorong pembentukan Koperasi Merah Putih sebagai wadah ekonomi kolektif masyarakat. Proses tersebut berlangsung melalui empat fungsi utama manajemen pemerintahan kampung: perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan.

1. Perencanaan (Planning) dilakukan secara partisipatif melalui musyawarah kampung, namun masih bersifat konseptual dan belum terdokumentasi dalam dokumen resmi seperti RPJM Kampung. Kelemahan utama terletak pada minimnya pemetaan potensi ekonomi lokal dan strategi implementasi yang terukur.
2. Pengorganisasian (Organizing) telah dilaksanakan melalui pembentukan tim kecil dan struktur pengurus awal, namun efektivitasnya masih terbatas karena belum ada pembagian tugas yang rinci dan bimbingan teknis dari dinas terkait.
3. Penggerakan (Actuating) menunjukkan komitmen pemerintah kampung dalam menggerakkan partisipasi masyarakat melalui sosialisasi dan pendampingan administratif. Meskipun demikian, keterlibatan warga masih perlu ditingkatkan melalui pelatihan, motivasi, dan penguatan kapasitas sumber daya manusia.
4. Pengawasan (Controlling) sudah dilakukan secara informal melalui rapat dan pemantauan langsung, tetapi belum memiliki sistem evaluasi tertulis dan mekanisme tindak lanjut yang terstruktur.

Secara keseluruhan, proses pembentukan Koperasi Merah Putih di Kampung Turiram sudah menunjukkan arah yang partisipatif dan kolaboratif, namun masih membutuhkan penguatan kelembagaan, legalisasi formal, dan peningkatan kapasitas masyarakat. Pemerintah kampung berperan penting sebagai fasilitator dan katalisator pembangunan ekonomi lokal berbasis kearifan dan potensi daerah.

DAFTAR REFRENSI

- Arifin, B., Susanti, S., & Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik. Edisi Revisi*. Rineka Cipta.
- Becker, B., & Gerhart, B. (1996). *The Impact of Human Resource*

- Edmundus Cuku, et al** Peran Peran Pemerintah kampung dalam Mendorong Pembentukan Koperasi Merah Putih di Kampung Turiram Distrik Kimam Kabupaten Merauke
Management on Organizational Performance. *Academy of Management Journal*, 39, 779–801.
<https://doi.org/10.2307/256712>
- Becker, G. S. (1993). *Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education (3rd ed.)*. University of Chicago Press.
- Chambers, R. (1997). *Whose Reality Counts? Putting the First Last*. Intermediate Technology Publications.
- Dwiyanto, A. (2006). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik* (Gadjah Mada University Press (ed.)).
- Dwiyanto, A. (2015). *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Gadjah Mada University Press.
- Eko, S., Khasanah, T. I., Widuri, D., Handayani, S., Handayani, N., Qomariyah, P., Akxa, S., Hastowiyono, Suharyanto, & Kurniawan, B. (2014). *DESA MEMBANGUN INDONESIA*. Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD).
- Fukuyama, F. (1995). *Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity*. The Free Press.
- Haris, S. (2016). *Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Desain dan Implementasi di Indonesia*. LIPI Press.
- Hasibuan, M. S. P. (2004). *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Bumi Aksara.
- Hasibuan, M. S. P. (2018). *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah. Edisi Revisi*. Bumi Aksara.
- Hendar. (2017). *Manajemen Koperasi*. Rajawali Pers.
- Monitor, P. (2023). URGENSI PENGEMBANGAN KOPERASI DESA MERAH PUTIH DALAM PERKEBUNAN SAWIT RAKYAT. *Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute.*, 2018(09), 23–30.
- Putnam, R. D. (1993). *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy*. Princeton University Press.
- Riyadi, S. (2015). *Perencanaan Pembangunan Daerah: Strategi Menggali Potensi dalam Otonomi Daerah*. Graha Ilmu.
- Saputri, A. R., Subandriyo, & Hardiyan, M. I. (2025). Koperasi Desa Merah Putih Dalam Perspektif Pembangunan Desa Dan Tata Kelola Pemerintahan. *Journal of Society Bridge*, 3(2), 95–106.
<https://doi.org/10.59012/jsb.v3i2.83>
- Siagian, S. P. (2003). *Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi, dan Strateginya*. Bumi Aksara.
- Siagian, S. P. (2004). *Manajemen Pembangunan Nasional*. Bumi Aksara.
- Siagian, S. P. (2005). *Administrasi Pembangunan dan Implementasinya di Indonesia*. Bumi Aksara.
- Siagian, S. P. (2006). *Teori dan Praktik Kepemimpinan*. Bumi Aksara.

- Siagian, S. P. (2017). *Manajemen sumber daya manusia*. Bumi Aksara.
- Simorangkir, D. J., Sinaga, P., & Setyowati, R. K. (2025). Kewenangan dan Pengawasan Pemerintah dalam Regulasi Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 4(September).
- Soekanto, S. (2002). *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Rajawali Press.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sukamdiyo. (2019). *Koperasi dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*. Deepublish.
- Suryono, A. (2018). *Kebijakan Publik dan Pembangunan Ekonomi di Indonesia*. Gava Media.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2011). *Economic Development*. Addison-Wesley.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). *Economic Development (12th ed.)*. Pearson Education.
- Widjaja, H. (2003). *Otonomi Desa: Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*. RajaGrafindo Persada.